



Warga Terban Minta Proyek Apartemen Disetop

YOGYA, TRIBUN - Warga penolak pembangunan apartemen Terban melakukan audiensi dengan DPRD di gedung DPRD Kota Yogyakarta. Dalam audiesi tersebut warga menyampaikan keluh-kesah dan kekhawatiran mereka terkait pembangunan apartemen.

Daruslan (78), warga tertua menyampaikan warga yang menolak ingin memperjuangkan hak anak dan cucunya kelak. Terdapat sebuah Taman Kanak-kanak yang terpicil di Terban. Banyak siswa dan guru yang bergantung pada TK tersebut, lanjutnya.

"Ada TK yang ndelik (tersembunyi, Red), siswanya banyak, gurunya dari berbagai daerah. Kalau nanti tempatnya hilang, mereka bagaimana? TK juga digunakan untuk berbagai aktivitas mayarakat, banyak manfaatnya. Kalau apartemen, yang diperjuangkan siapa?," ungkap Daruslan.

Nenek yang sudah 40 tahun tinggal di Terban tersebut ingin lingkungannya tenteram, aman, dan damai. Jangan diganggu dengan dengan pembangunan apartemen yang tidak bermanfaat bagi orang banyak.

"Saya ini sudah tua, pengin lingkungan tentram, aman, dan damai. Makanya saya mohon pada bapak ibu di depan untuk menghentikan apartemen," katanya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Iriyanti. Ia menolak keras pembangunan apartemen di Terban. Bahkan dirinya pernah diming-mingi sejumlah

uang, namun ditolak.

"Makanya, saya mohon kepada bapak ibu yang ada di hadapan saya untuk setop pembangunan apartemen. Kalau bukan kepada bapak/ibu sekalian sebagai wakil rakyat, kepada siapa lagi kami minta tolong," kata Iriyanti dengan suara bergetar.

Kuesioner abal-abal

Sekretaris Forum Warga Penolak, Tulus Wardaya mengatakan, tahun 2014 ada sosialisasi bahwa PT. Adhi Persada Properti (APP) akan membangun sebuah apartemen Taman Melati Sardjito (TMS). Dalam perjalanannya banyak terjadi perdebatan, hingga mengakibatkan terpecahnya warga menjadi kubu pro dan kontra.

"Warga terpecah jadi pro dan kontra. Banyak terjadi maladministrasi. Warga dibagikan kuesioner abal-abal, apesnya kuesioner itu untuk mengajukan AMDAL. Tetapi karena ... ini menolak sidang AMDAL gugur," terang Tulus.

Setelah mulai tenang, tiba-tiba muncul undangan sosialisasi dengan pembangunan apartemen baru. Dhika Universe Sardjito oleh APP Tulus mengatakan warga menolak untuk hadir. Ia menilai banyak pelanggaran yang dilakukan oleh APP.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menyimpulkan menjadi tiga poin utama. Tiga poin tersebut adalah mekanisme perizinan APP untuk membangun, aturan perundang-undangan dan prosedur pengurusan izin, dan pemas-

alahan internal warga.

"Yang jadi kunci kan bagaimana mekanisme perizinan APP? Sudah sesuai belum, terutama pada legal atau tidaknya, karena itu sarana untuk menentukan benar dan salah. Kalau sudah, kita bicara aspek sosilogisnya pembangunan, yang terakhir masalah internal warga," ungkapnya.

Sebatas rekomendasi

Nasrul mengatakan kronologis yang disampaikan warga sudah detail, namun masih perlu dikuatkan pada bagian pembuktian legalitas. Ia menyampaikan, masyarakat perlu memahami bahwa hal tersebut merupakan gambaran perubahan sosiologis masyarakat Yogyakarta ke depan.

"Kami nanti akan undang perwakilan dari bapak/ibu sekalian untuk bicara intensif. Lalu kami akan panggil eksekutif secara terpisah, dan kami akan panggil dari pihak APP juga secara terpisah," jelas Nasrul.

Ia mengatakan proses yang paling tinggi yang bisa diberikan DPRD Kota Yogyakarta adalah rekomendasi. Meskipun hanya rekomendasi, namun DPRD memiliki hak untuk memaksa pihak terkait untuk melaksanakan.

"Jaga kondusivitas, jangan sampai terjadi perselisihan internal. Yang penting komunikasi kita tetap berjalan. Proses yang paling tinggi hanya rekomendasi, tetapi kami berhak untuk memaksa," katanya. (cr2)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Kecamatan/Kemantren Gondokusuman			
3. Kelurahan Terban			
4. Forpi			
5. Dinas Lingkungan Hidup			

Yogyakarta, 28 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

